

## **PRAKTIK KAPITALISME LADA DI PALEMBANG PADA ABAD KE-18 HINGGA AWAL ABAD KE-20**

### ***The Pepper Capitalism Practice in Palembang in 18<sup>th</sup> to Early 20<sup>th</sup> Centuries***

**Aryandini Novita<sup>1)</sup>, Muhamad Nofri Fahrozi<sup>1)</sup>, dan Muhamad Alnoza<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Balai Arkeologi Sumatra Selatan

Jalan Kancil Putih, Demang Lebar Daun, Palembang

<sup>2)</sup>Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta

*e-mail:* novitaaryandini@gmail.com

Naskah diterima: 9-06-2021 - Revisi terakhir: 27-11-2021

Disetujui terbit: 30-11-2021 - Tersedia secara *online*: 30-11-2021

#### ***Abstract***

*Pepper (Piper nigrum) is one of the cultivated plants and since the past has become a commodity traded in international commerce. In the past several regions of the archipelago have cultivated pepper, such as Banten, southern Sumatra, and Aceh. This paper aims to describe the ebb and flow of pepper as a trading commodity during the 18th to early 20th centuries concerning the practice of capitalism in the South Sumatra region. The method of articles is a literature study with data sources the result of archaeology research and history research as well as other library data related to pepper as commodities in the South Sumatra region during the 18th century to the early 20th century. The results showed that colonialism had encouraged pepper production in South Sumatra on a large scale. However, along with changes in global market demand, there has been a change in the orientation of the cultivation of commodity crops so that it can be said that colonialism also brought down pepper production.*

**Keywords:** *Pepper Capitalism; Global Commerce; Colonialism, Palembang; the 18<sup>th</sup> to 19<sup>th</sup> Centuries*

#### **Abstrak**

Lada (*Piper nigrum*) adalah salah satu tanaman budi daya dan sejak masa lalu telah menjadi komoditas yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Pada masa lalu beberapa wilayah Nusantara telah membudidayakan lada, seperti Banten, Palembang, Lampung dan Aceh. Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran pasang surut tanaman lada sebagai salah satu komoditas dagang pada kurun waktu abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20 dalam kaitannya dengan praktik kapitalisme di wilayah Sumatra Selatan. Metode penulisan artikel adalah studi kepustakaan dengan sumber data berupa hasil penelitian arkeologi dan sejarah ataupun data kepustakaan lainnya yang terkait dengan komoditas lada di wilayah Sumatra Selatan pada kurun waktu abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolonialisme telah mendorong adanya produksi lada di Sumatra Selatan secara besar-besaran. Namun, perubahan permintaan pasar global mendorong terjadinya perubahan orientasi budi daya tanaman komoditas sehingga dapat dikatakan bahwa kolonialisme juga yang akhirnya meruntuhkan produksi tanaman lada.

**Kata kunci:** kapitalisme lada, perdagangan global, kolonialisme; Palembang. Abad ke-18 hingga abad ke-20

## PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa berbagai jenis rempah-rempah merupakan tanaman yang dibudidayakan di berbagai daerah di Nusantara. Sejak masa lalu hampir seluruh wilayah Nusantara membudidayakan rempah-rempah, seperti Banten, Palembang, Lampung, dan Aceh yang membudidayakan lada (*Piper nigrum*); Banda membudidayakan pala (*Myristica fragrans*); pulau-pulau di Maluku membudidayakan cengkeh (*Syzygium aromaticum*); kawasan Kepulauan Nusa Tenggara membudidayakan kayu manis (*Cinnamomum verum*) dan kayu cendana (*Santalum album*) (Sulistiyono 2014). Marsden (2016) mencatat bahwa lada merupakan hasil dan komoditas utama Sumatra.

Lada di Sumatra Selatan atau Palembang, khususnya di masa lampau, berperan penting sebagai komoditas yang laku di pasaran mancanegara. Farida (2009) menyebut bahwa Sultan Palembang bahkan sejak abad ke-17, telah membuat kontrak khusus mengenai perdagangan lada dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Tercatat pada tahun 1662, harga lada per pikul mencapai empat real. Eksistensi lada sebagai komoditas ini terus berkembang hingga abad ke-19, sampai akhirnya Kesultanan Palembang benar-benar dihapuskan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tahun 1823 (Farida, 2009).

Lada termasuk dalam kategori tanaman rempah, yaitu tanaman yang dapat digunakan baik untuk bumbu masakan maupun untuk bahan pembuatan obat-obatan (Hakim, 2015). Turner (2011) menyatakan bahwa pada masa lalu rempah-rempah juga merupakan simbol tertentu bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Selain sebagai obat, rempah-rempah digunakan juga sebagai pengawet, alat upacara keagamaan, penambah kenikmatan seksual sehingga karena manfaatnya tersebut rempah-rempah disebut sebagai buah dari surga. Sulistiyono (2014) menyatakan bahwa lada di masa lalu dimanfaatkan sebagai obat. Catatan Santo Benedictus Crispus menuliskan bahwa pada abad ke-8 campuran cengkeh, lada, dan kayu manis digunakan sebagai obat encok; lada juga dimanfaatkan sebagai obat lemah jantung, sariawan, dan jika dicampur dengan empedu kelinci digunakan untuk obat disentri.

Dalam perdagangan internasional, komoditas lada yang berasal dari Indonesia dikenal dengan nama *Muntok white pepper* untuk lada putih dan *Lamong black pepper* untuk lada hitam (Yuhono, 2005; Yudiyanto, 2013). Dalam perekonomian Nasional, komoditas lada menempati urutan keempat dalam pendapatan devisa negara setelah minyak sawit, karet, dan kopi (Kemala, 2011; Yudiyanto, 2013). Saat ini lada banyak diolah menjadi minyak dan terutama digunakan sebagai pemberi aroma dan rasa pada berbagai makanan serta dipakai dalam industri kosmetik dan farmasi (Kemala, 2011; Yudiyanto, 2013).

Dengan mengacu pada keterangan mengenai pentingnya lada sebagai komoditas masa lampau serta manfaatnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa produksi lada sebagai komoditas di Palembang telah diatur sedemikian rupa oleh para penguasa setempat demi memenuhi kebutuhan konsumennya. Asumsi dasar ini merujuk pada pendapat Karl Marx (1867) mengenai praktik kapitalisme, yaitu penguasa sebagai pemilik modal telah mengeksploitasi lahan produksinya melalui kelas pekerja (proletar) demi mempertahankan kekuasaannya.

Berangkat dari asumsi dasar tersebut, penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktik kapitalisme lada yang berlangsung di Palembang? Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang tanaman lada sebagai salah satu komoditas dagang wilayah Sumatra Selatan dalam kurun waktu abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20. Pemilihan kurun waktu tersebut disebabkan pada abad ke-18 lada merupakan salah satu komoditas perdagangan utama dari Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, sejak pertengahan abad ke-19 perdagangan lada mengalami penurunan hingga akhirnya pada awal abad ke-20 komoditas tersebut menjadi teralihkan akibat perubahan permintaan pasar global (Masyhuri, 1983; Stroomberg, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 di Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang terdiri atas pengumpulan data dan analisis (Somantri, 2005). Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu studi yang menggunakan metode pengumpulan dan analisis dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah data dari sumber-sumber tertulis (Zed, 2003). Sumber data pada penelitian ini adalah hasil penelitian arkeologi dan sejarah ataupun data kepustakaan lainnya yang terkait dengan komoditas lada di wilayah Sumatra Selatan dalam kurun waktu abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskripsi-komparatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dan diperbandingkan satu sama lain. Pola-pola yang kemudian muncul dari hasil analisis kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pasang Surut Perdagangan Lada di Sumatra Selatan Abad Ke-18–Awal Abad Ke-20**

Secara morfologi, tanaman lada merupakan tanaman merambat dan merupakan tanaman tahunan. Lada termasuk kelas *Dicotyledon*, ordo *Piperales*, famili *Piperaceae*, genus *Piper*, dan spesies *Piper nigrum* (Gambar 1). Tanaman lada akan tumbuh dengan baik pada ketinggian tempat antara 0 sampai 1.000 meter dari permukaan laut. Topografi lahan yang agak landai merupakan lahan yang paling baik bagi pertumbuhan lada. Tanaman ini memerlukan tanah yang gembur dengan lapisan atas kaya akan humus, mempunyai daya mengikat air yang baik, dan mempunyai aerasi dan drainase yang baik (Faisal, 1984; Yudiyanto, 2013).

Secara keseluruhan terdapat tidak kurang dari 600 jenis dari genus *Piper* yang hidup di daerah tropis (Yudiyanto, 2013). Sebelum masyarakat Sumatra Selatan mengenal lada spesies *Piper nigrum*, wilayah ini telah memperdagangkan salah satu jenis lada-ladaan, yaitu kemukus (*Piper cubeba*) (Gambar 2). Komoditas ini pada abad ke-8 merupakan primadona di pasar Cina dan Nusantara (Andaya, 2016). Secara umum wilayah Sumatra mulai membudidayakan jenis lada-ladaan spesies *Piper nigrum*, mulai abad ke-15 yang diperkenalkan oleh pedagang India (Arman, 2018; Andaya, 2016). Sama seperti lada, kemukus juga digunakan sebagai penambah rasa makanan, minuman, dan wewangian (Kusumarini dan Ariyanti, 2015).



**Gambar 1** Tanaman Lada (*Piper nigrum*)  
(Sumber: Marsden, 2016)



**Gambar 2** Tanaman Kemukus (*Piper cubeba*)  
(Sumber: <https://wanaswara.com/kemukus/>)

Bukti keberadaan rempah di wilayah Pantai Timur Sumatra ditemukan pada tahun 2013 dalam penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatra Selatan. Berdasarkan hasil ekskavasi yang dilakukan di wilayah Margomulyo, Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan berhasil ditemukan *kluwak* atau *kepayang* (*Pangium edule*) yang biasa digunakan sebagai bumbu masak (Gambar 3). Selain temuan *kluwak*, di dalam laporan penelitian juga disinggung temuan damar (*Agathis damarra*) (Gambar 4) dari wilayah tersebut.



**Gambar 3** Temuan Buah *Kluwak* atau *Kepayang* (*Pangium edule*) Hasil Penelitian di Air Sugihan (Sumber: Balai Arkeologi Sumatra Selatan, 2013)



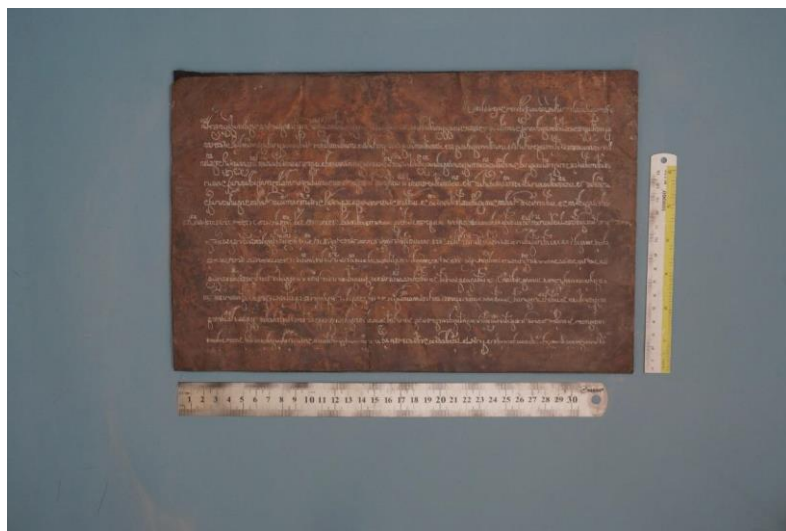
**Gambar 4.** Temuan Getah Damar (*Agathis damarra*) Hasil Penelitian di Air Sugihan (Sumber: Balai Arkeologi Sumatera Selatan 2013)

Lebih lanjut, damar juga ditemukan pada penelitian Balai Arkeologi Sumatra Selatan tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pantai Timur Sumatra, tepatnya di wilayah SP 5, Sungailumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di samping damar,

rempah lain juga ditemukan pada penelitian ini, yaitu pala (*Myristica fragrans*). Pada penelitian tersebut damar banyak ditemukan saat survei ataupun ekskavasi di sekitar lokasi penelitian (Wiyana *et al.*, 2018). Hal ini tentu saja mengindikasikan eksistensi rempah pada masa Sriwijaya atau bahkan pra-Sriwijaya, telah menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Dengan mengaitkannya pada bukti lain seperti keramik Cina dan manik-manik, temuan serta damar yang merupakan varian dari rempah-rempah ini dapat dikategorikan pula sebagai komoditas dagang. Terlebih juga hal itu dikuatkan dengan temuan damar yang begitu masif di wilayah tersebut. Walaupun belum ditemukan secara langsung jejak arkeologi dari tanaman lada, temuan-temuan seperti kluwak, damar dan pala di wilayah Pantai Timur Sumatra cukup menunjukkan bahwa posisi rempah dalam keseharian kehidupan masyarakat masa pra-Sriwijaya hingga masa Sriwijaya merupakan hal yang vital.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa lada menjadi salah satu primadona dalam perdagangan internasional pada abad ke-16 (Reid, 2011). Pada pertengahan abad ke-17 komoditas lada Nusantara mulai menguasai pasar Eropa. Pasaran lada di Eropa pada awalnya didatangkan melalui India, tetapi pada masa tersebut lada didatangkan langsung dari Nusantara (Reid, 2011). Salah satu wilayah penghasil komoditas lada pada masa itu adalah Sumatra Selatan, yaitu pada masa itu wilayah ini merupakan wilayah Kesultanan Palembang Darussalam.

Masyhuri (1983) menyebutkan bahwa lada merupakan hasil pertanian yang memiliki kedudukan penting dalam struktur perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam hal ini Sultan Palembang mengawasi secara teratur hasil bumi tersebut. Data arkeologi yang menunjukkan arti penting lada pada masa itu tertuang pada sebuah *piagem* tembaga yang mengatur perdagangan dan pertanian lada di wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Bandingagung.



**Gambar 5** *Piagem* Tanjung Koleksi Museum Negeri Provinsi Sumatra Selatan, Balaputradewa (Sumber: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2020)

*Piagem* tersebut oleh Suhadi (1990) diberi nama sebagai *piagem* Sukabumi. Penamaan ini disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yaitu di Desa Sukabumi, Kecamatan Bandingagung, Kabupaten Ogan Komering Ulu.<sup>1</sup> Namun, Museum Negeri Provinsi Sumatra Selatan, Balaputradewa, yang menyimpan *piagem* tersebut menamakannya sebagai *piagem* Padanggratu, sesuai dengan nama desa lokasi ditemukannya. Penelitian Andhifani *et al.* (2020) menamakan *piagem* tersebut sebagai *piagem* Tanjung (Gambar 5). Penamaan ini didasari oleh catatan Tjandrasasmita (1976) yang menyatakan bahwa nama Sukabumi adalah nama dusun yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Bandingagung.

*Piagem* Tanjung dikeluarkan pada tahun 1764 oleh Sultan Ratu Akhmad Najamuddin. Bahasa dan aksara yang digunakan dalam *piagem* ini adalah aksara Jawa Tengahan yang berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18 (Suhadi, 1990; Andhifani *et al.*, 2020). *Piagem* ini diberikan kepada Pangeran Mangku Hanom dan berisikan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh warga setempat. Salah satu hal yang diatur dalam *piagem* tersebut adalah aturan mengenai penanaman lada dan pemberian hukuman bagi warga yang tidak mau menanamnya (Suhadi, 1990).

Selain itu, terdapat juga sebuah *piagem* berbahan perak. *Piagem* ini merupakan koleksi Museum Nasional dan diberi kode *Piagem* No 10. *Piagem* ini dikeluarkan oleh Sultan Palembang dan diberikan kepada Prawatin Sungai Keruh. Sama seperti *Piagem* Tanjung, salah satu isi dari *piagem* ini mengatur kewajiban menanam lada dan pemberian hukuman bagi warga yang tidak mau menanamnya. *Piagem* ini ditulis dengan aksara Jawa Tengahan dengan angka tahun 1760 (Suhadi, 1990).

Pengaturan penanaman lada ini menurut Suhadi (1990) mengindikasikan adanya unsur pemaksaan oleh Sultan Palembang terhadap rakyatnya. Hal ini didasari oleh catatan De la Faille (1975) yang menyatakan bahwa Sultan Palembang terpaksa bekerja sama dengan VOC akibat tekanan-tekanan yang berasal dari internal kesultanan, yaitu perebutan tahta ataupun dari eksternal, yaitu serbuan dari Kesultanan Jambi.

Masyhuri (1983) memperkirakan tanaman lada mulai menjadi komoditas ekspor utama bagi Kesultanan Palembang Darussalam sejak pertengahan abad ke-17 yang pada saat itu perdagangan lada di wilayah ini berada di bawah pengawasan Kesultanan Banten. Konflik antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan Kesultanan Jambi membuat Kesultanan Palembang melepaskan diri dari Banten dan mengadakan kontrak dagang dengan VOC (Masyhuri, 1983; Andaya, 2016). Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa VOC mendapat hak penuh untuk memonopoli pembelian lada dan diberikan izin untuk mendirikan loji serta mengawasi lalu lintas perdagangan Kesultanan Palembang Darussalam (Hanafiah, 1989; Masyhuri, 1983).

Hingga akhir abad ke-18 mekanisme perdagangan lada dikuasai oleh Sultan dan VOC. Pembelian lada dari masyarakat dimonopoli oleh sultan, sementara penjualannya ke pasar internasional dikuasai oleh VOC. Pada akhir abad ke-18, ketika VOC dibubarkan, wilayah kekuasaannya di Sumatra Selatan kemudian diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, monopoli sultan dalam pembelian lada dari masyarakat terus berlangsung hingga pertengahan abad ke-19 ketika Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Masyhuri, 1983; Supriyanto, 1983).

Secara umum wilayah-wilayah penghasil lada di Sumatra Selatan pada abad ke-18 masih sulit dipetakan. Masyhuri (1983) memperkirakan wilayah Rawas, Beliti, dan Kelingi merupakan daerah penghasil lada terbesar pada masa itu. Sementara itu, Wellan (1923) melaporkan bahwa pada awal abad ke-20 wilayah penghasil lada yang ditujukan untuk diekspor adalah Ogan, Komering, dan Lematang. Wellan juga mencatat berdasarkan data dari bea dan cukai, produk kopi merupakan produk pertanian yang terpenting dengan nilai ekspor tahunan rata-rata f 17.000.000; diikuti oleh karet dengan nilai ekspor f 12.000.000; rotan yang sebenarnya merupakan hasil hutan senilai f 1.000.000. Lada menduduki posisi keempat dalam produk ekspor Palembang, yaitu senilai f 790.000.

Hingga awal abad ke-19 pelayaran dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sebagai tujuan perdagangan memakan waktu yang cukup lama. Perubahan dimulai sejak ditemukan dan dikembangkannya teknologi kapal uap sehingga pada waktu itu kapal-kapal tidak bergantung pada pola angin, kondisi ini akhirnya memengaruhi rute perdagangan maritim (Pascali, 2017; Novita *et al.*, 2018). Pembukaan Terusan Suez pada pertengahan abad ke-19 semakin mempersingkat waktu pelayaran dari Eropa ke wilayah Asia Tenggara (Stroomberg, 2018). Keadaan ini sangat menguntungkan bagi Hindia Belanda yang secara strategis berada di posisi paling strategis dalam perdagangan dunia sehingga pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan untuk mengembangkan produk pertanian yang diorientasikan sebagai komoditas ekspor (Stroomberg, 2018).

Pada 1833 pemerintah Hindia Belanda mulai memperkenalkan budi daya kopi di Sumatra Selatan. Kopi tumbuh dengan sangat baik di wilayah ini sehingga sampai awal abad ke-20, Sumatra Selatan bersama wilayah Sumatra Barat menyumbang 11% dalam produksi kopi Hindia Belanda (Stroomberg, 2018). Untuk menunjang distribusi komoditas, pada tahun 1858 di Palembang dibangun pelabuhan yang lengkap dengan fasilitas kepelabuhan, seperti dermaga, kolam, dan lapangan tempat bongkar muat barang. Sebagai pelabuhan dagang, Palembang didukung oleh daerah pedalaman yang merupakan daerah produksi komoditas kapas, kopi, the, dan lada (Supriyanto, 1983; Wellan, 1923; Stroomberg, 2018). Selain itu, komoditas timah yang juga merupakan komoditas unggulan Hindia Belanda yang didatangkan dari Pulau Bangka menjadikan Pelabuhan Palembang sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara (Supriyanto, 1983). Selama periode 1824--1864 pelabuhan tersebut menjadi urat nadi perkembangan ekonomi Palembang sehingga sejajar dengan kota-kota pelabuhan di Pulau Jawa, seperti Batavia, Gresik, dan Cirebon (Supriyanto, 1983). Selain di Palembang, Pemerintah Hindia Belanda juga membangun pelabuhan di kota-kota lainnya sebagai reaksi terhadap keberhasilan Inggris yang mengembangkan Singapura sebagai pelabuhan bebas (Mulya, 2014).

Meningkatnya perekonomian Hindia Belanda memberi peluang bagi perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika untuk mendirikan kantor dagangnya di wilayah ini. Umumnya perusahaan-perusahaan besar tersebut mendirikan cabangnya di kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang. Hingga tahun 1930 perusahaan dagang besar mulai melakukan ekspansi ke kota-kota di luar Pulau Jawa, seperti Palembang, Makassar, Medan, Banjarmasin, dan Pontianak.



Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya melakukan perdagangan ekspor, tetapi juga juga mendatangkan barang-barang impor.

Seiring dengan perkembangan pemerintah Hindia Belanda juga membuat kebijakan yang memperbolehkan pihak swasta untuk berinvestasi, yang diawali dengan kesempatan untuk menanam modal pada pembukaan perkebunan, kemudian merambah ke sektor pertambangan. Masuknya sektor swasta ini meningkatkan produksi komoditas ekspor Hindia Belanda, yaitu tebu, kopi, tembakau, kina, karet, dan kelapa sawit. Kondisi tersebut semakin ditunjang oleh tingginya permintaan dunia terhadap komoditas karet dan minyak bumi. Kegiatan pertambangan di wilayah Sumatra Selatan diawali dengan eksplorasi minyak bumi di Banyuasin pada tahun 1885, kemudian di Lematang Ilir dan Muara Enim pada tahun 1897. Tahun 1906 di wilayah Banyuasin juga mulai dibuka perkebunan karet yang kemudian disusul dengan perkebunan sawit di wilayah yang sama pada tahun 1911 (Zubir, 2015). Selain itu, pertambangan batubara juga mulai ditemukan di Bukit Asam dan mulai dieksplorasi pada tahun 1919 (Novita, 2013). Pembangunan kilang minyak di Plaju dan Pendopo serta pembukaan tambang batu bara di Bukit Asam semakin meningkatkan komoditas ekspor yang diproduksi Sumatra Selatan (Stroomberg, 2018).

Seiring dengan peningkatan permintaan akan komoditas karet dan minyak bumi, terjadi penurunan dalam produksi lada. Sejak tahun 1821 produksi lada di daerah pedalaman Sumatra Selatan sulit dipasarkan sehingga masyarakat lebih memilih tanaman yang secara langsung hasilnya dapat dinikmati, seperti padi (Supriyanto, 1983). Menurut Wellan (1923) petani-petani lada tersebut enggan menanam lada karena proses produksi komoditas tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan memakan waktu yang lama.

Penyebab merosotnya produksi lada di Sumatra Selatan tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Jika ditelaah lebih jauh lagi kemungkinan lebih karena pembangunan jaringan jalan darat dan kereta api di wilayah Sumatra Selatan. Pada tahun 1840 mulai dibangun jaringan jalan darat yang menghubungkan Palembang dengan wilayah-wilayah pedalaman yang merupakan penghasil komoditas ekspor, seperti Tebing Tinggi dan Ogan Ilir. Sama seperti jaringan jalan darat, pembangunan jaringan kereta api di Sumatra Selatan yang dimulai pada tahun 1914 utamanya ditujukan untuk angkutan barang, terutama hasil pertambangan dan perkebunan (Santun, 2011; Novita, 2013).

Pembangunan rel pertama dilakukan dari Kertapati, Palembang menuju Prabumulih sepanjang 78 km kemudian dari Prabumulih mengarah ke selatan hingga bertemu dengan rel yang dibangun dari Tanjungkarang. Dalam hal ini Prabumulih merupakan titik persimpangan ke arah selatan dan barat. Jalur kereta api dari Prabumulih ke arah selatan menuju Baturaja dan Martapura; sedangkan ke arah barat menuju Muaraenim, Lahat, Tebingtinggi, dan Lubuklinggau. Secara keseluruhan jalur ke selatan selesai pada tahun 1924 dan jalur ke barat selesai pada tahun 1933 (Oegema, 1982; Novita, 2013). Senada dengan hal tersebut Wellan (1923) melaporkan bahwa sebelumnya lada-lada yang berasal dari Menggala, Lampung dibawa ke pelabuhan Palembang dengan menggunakan perahu. Jalur ini sebenarnya harus ditempuh dengan jarak yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Setelah *Koninklijke Pakketvaart*



*Maatschappij* (KPM) membuka layanan reguler di pelabuhan Telukbetung dan *Zuid-Sumatra-Spoor* (ZSS) mendirikan layanan mobil antara Menggala dan Blambangpagar, para pedagang tidak perlu membawa dagangannya ke Palembang lagi, tetapi langsung ke Telukbetung.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa merosotnya produksi lada di Sumatra Selatan lebih karena adanya perubahan permintaan di pasar global. Munculnya inovasi-inovasi baru dalam teknologi transportasi juga secara tidak langsung telah memengaruhi eksistensi lada sebagai komoditas ekspor unggulan. Berkaitan dengan hal tersebut, Stroomberg (2018) melaporkan juga bahwa peran Hindia Belanda sebagai penyuplai komoditas rempah-rempah dunia bertahan hingga di paruh tahun 1920-an. Keterpurukan produksi lada semakin bertambah dengan dibangunnya jaringan jalan dan kereta api juga yang memang ditujukan sebagai sarana dalam proses distribusi komoditas-komoditas ekspor unggulan yang baru.

### **Praktik Kapitalisme dalam Perdagangan Lada di Sumatra Selatan Abad Ke-18-- Awal Abad Ke-20**

Kapitalisme yang identik dengan pasar dan perdagangan bebas salah satunya diindikasikan dengan hadirnya bangsa Eropa di Nusantara. Fenomena tersebut juga terjadi di daratan Sumatra, di Pantai Barat ditandai dengan hadirnya *English India Company* (EIC) (Marsden, 2016) dan di Pantai Timur, termasuk wilayah Sumatra Selatan masuk dalam ranah VOC (R.Z. Leirissa, Ohorella, dan Tangkilisan, 2012).

Melalui kajian yang dilakukan pada data sejarah dan arkeologi terkait, penelitian ini memandang peran kolonialis telah menggeser tatanan sosial masyarakat yang mereka duduki, khususnya dalam hal ini wilayah Palembang. Teknologi dan modernisasi menggeser kedigdayaan dan pengkultusan sosok raja dan bangsawan. Perlahan, tetapi pasti telah terjadi pergeseran tren, hal tersebut memaksa raja dan bangsawan lokal membangun strategi untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah masyarakat. Terdapat beberapa argumentasi dasar dalam memahami pernyataan ini.

Pertama, kerja sama antara kaum kapitalis asing atau bangsa kolonial dan kaum bangsawan lokal menempati kelas baru dalam tatanan sosial masyarakat masa lalu. Pada saat itu, bangsa kolonial telah mulai mendapat posisi politis yang kuat sebelum lebih dalam lagi menjajah masyarakat kecil di Hindia-Belanda. Lada dan rempah lain menjadi saksi dari strategi licik penguasa lokal dan pemilik modal asing dalam upaya kuasa-menguasai (R.Z. Leirissa, Ohorella, dan Tangkilisan 2012).

Kedua, hubungan antara penguasa lokal dan kapitalis asing telah menempatkan rakyat kecil menjadi golongan proletar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan standar kehidupan bagi rakyat. Jika dahulu rakyat jelata menjadi objek penindasan dari kehidupan para raja yang berkuasa, pada era kapitalis, kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik karena bangsawan lokal dan swasta asing sebagai pemilik modal bersatu padu menghisap hasil bumi dengan rakyat yang dibayar murah sebagai mesin penggerakannya sehingga masyarakat kelas bawah semakin parah (Heller, 2011).

Praktik kapitalisme dalam perdagangan lada di Sumatra Selatan dari hasil analisis yang dilakukan pada data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu kapitalisme yang berkaitan dengan feodalisme dan

kapitalisme yang berkaitan dengan kolonialisme.

Pembagian periodisasi perkembangan kapitalisme lada ini disandarkan pada teori perkembangan kapitalisme oleh Marx (1867). Praktik kapitalisme dalam sejarah dunia dapat dilacak keberadaannya semenjak kemunculan sistem feodalisme. Marx dalam Heller (2011) bahkan menyebutkan bahwa embrio dari kapitalisme adalah feodalisme itu sendiri. Kalangan Marxis menyebut bahwa sejarah kapitalisme dapat dibagi lima periode besar, antara lain masa kegiatan berburu dan meramu, masa kegiatan perbudakan, masa praktik feodalisme, masa praktik kapitalisme, dan sosialisme. Sistem feodalisme secara tidak langsung menguatkan posisi para tuan tanah sebagai pemilik modal untuk mempertahankan kuasa politik dan kelas sosialnya melalui produksi atas tanah yang dimilikinya.

Neale (1975) menyebutkan bahwa pada masa maraknya sistem feodalisme, negara atau kerajaan berperan besar dalam menciptakan kelas sosial yang terstruktur. Feodalisme dalam perspektif sosiologi bergerak atas adanya interaksi sosial yang bersifat *gemeinschaft* atau dalam hal ini berkaitan dengan hubungan *patron-klien* para pemilik tanah dan penggarapnya. Oleh karena sifat tersebut, sistem feodalisme dapat dikatakan hanya mengandalkan “kesukarelaan” para penggarap tanah/buruh terhadap tuan tanahnya. Tuan tanah dalam konteks ini hanya menyandarkan kepentingan ekonominya pada modal politik (posisi jabatan di pemerintahan) dan modal sosial yang dimilikinya untuk mempertahankan keberlanjutan produksi dari tanah yang dimilikinya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang di tengah masyarakat perlahan meruntuhkan sistem ini.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Leirissa, *et al.* (2012) yang menyebutkan dua model kapitalisme yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme dengan model Asia dan kapitalisme dengan model Eropa. Kapitalisme model Asia berkembang hanya sampai pada abad ke-18, sebagaimana yang diceritakan sebelumnya bahwa kapitalisme model ini merupakan nama lain dari feodalisme, yang tidak memberikan jaminan keselamatan pada hak milik pribadi karena penguasa atau raja memiliki kekuasaan absolut. Sementara itu, sistem kapitalisme yang berkembang di Eropa mengalami perkembangan pada abad ke-18 dan berkembang makin pesat pada abad ke-19 dan 20. Kapitalisme model ini memberi kesempatan bagi pengusaha atau kaum *bourgeoisie* untuk memberikan dana kepada raja-raja sebagai pelindungnya guna memperkuat tentara dan birokrasinya. Implikasinya kemudian adalah timbul institusi lain di bidang perbankan dan sektor industri yang nantinya melahirkan industrialisasi.

Sultan Palembang pada kasus di Palembang beserta institusi kesultannya telah menjadi agen kapitalis awal (dalam hal ini feodalisme) yang menggerakkan produksi lada secara besar-besaran di beberapa tempat di Sumatra Selatan. Bukti dari praktik kapitalis awal ini dapat dilacak melalui tinggalan arkeologis berupa *piagem* yang dikeluarkan oleh sultan-sultan Palembang. *Piagem* yang dalam hal ini merupakan maklumat resmi kerajaan telah digunakan sebagai alat legitimasi penguasa Palembang dalam mengontrol produksi lada di wilayah kekuasaannya. Secara sistematis sultan mengatur jumlah lada yang harus diproduksi oleh Kesultanan Palembang bagi kebutuhan pasar melalui pembangunan lahan-lahan produksi masif di daerah pedalaman.

Rakyat dalam hal ini diposisikan sebagai *klien*, yang secara sukarela menaati perintah penanaman lada. Ketaatan rakyat tersebut dapat diartikan sebagai suatu fenomena *gemeinschaaft* pada proses produksi lada di Palembang. Adapun sebab munculnya ketaatan ini adalah berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, perintah penanaman disalurkan melalui perintah resmi raja terhadap penguasa lokal. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sultan telah “meminjam” modal sosial penguasa lokal yang secara logis memiliki kekuasaan langsung terhadap rakyat setempat. Penguasa-penguasa lokal yang diperintah sultan ini juga secara tidak langsung telah diberi kekuasaan oleh sultan untuk mengawasi lahan produksi sang sultan di setiap daerah yang diberi *piagem*. Kedua, sultan telah membangun instrumen hukum dalam hal penanaman lada. Artinya adalah tindakan penanaman lada secara legal diatur oleh negara sehingga bentuk penolakan apa pun terhadap produk hukum ini sama saja dengan membangkang negara. Tentu dalam hal ini, pembangkangan akan menimbulkan konsekuensi hukuman terhadap oknum yang melakukannya.

Kolonialisme di sisi lain sebagai motor penggerak ekonomi dunia Eropa Barat sejak abad ke-15 hingga abad ke-20 dipandang sebagai alat yang menjadi suatu kesatuan dengan sistem kapitalisme zamannya. Kolonialisme dalam konteks kapitalisme lebih menekankan tujuan perluasan pasar dan wilayah produksi. Perluasan pasar berkontribusi dalam memperbanyak jumlah permintaan dan penawaran dari berbagai tempat sehingga keuntungan yang diraup pun diharapkan menjadi lebih besar. Perluasan wilayah produksi di sisi lain mampu memperkuat posisi tawar suatu entitas ekonomi dalam lingkup perdagangan yang luas karena kelengkapan barang-barang produksi yang ditawarkan ke pasar yang besar (Heller, 2011).

Kolonialisme yang berjalan berabad-abad juga ditunggangi oleh nuansa Eropasentris yang berkembang di Eropa pada masa modern awal, yang sifatnya agresif dan tidak egaliter. Sistem tersebut pula yang kemudian mendorong adanya sistem monopoli ekonomi suatu komoditas di suatu daerah oleh para kolonis (Heller, 2011). Hampir serupa dengan feodalisme, kolonialisme juga bergerak dalam ruang politik. Perbedaan yang paling jelas di antara keduanya terlihat dari ruang lingkup yang berbeda. Konsep *patron-klien* pada feodalisme yang tadinya berkembang hanya pada suatu komunitas di suatu negara menjadi lebih luas cakupannya (Blaut, 1989; Bowen, 2015).

Pada kasus di Palembang, terutama pascakejatuhan Kesultanan Palembang, kepentingan atas produksi lada berubah sama sekali. Bagi wilayah-wilayah produksi lada, penanaman lada yang sebelumnya kuat akan kesan instrumen hukum adatnya, berubah sama sekali menjadi suatu struktur ekonomi kolonial. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang sebelumnya memanfaatkan hubungan *patron-klien* tradisional Kesultanan Palembang dan memosisikan diri sebagai mitra dagang, bertransformasi menjadi produsen komoditas lada. Posisi rakyat yang sebelumnya terpaut secara adat dengan penguasa berubah posisinya menjadi warga kolonial yang wajib memenuhi kebutuhan devisa negara Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang lebih agresif telah “memaksa” rakyat untuk menanam lada sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial. Dengan demikian, dorongan untuk memproduksi lada masa kolonial juga berbeda sama sekali dengan dorongan produksi lada masa Kesultanan Palembang yang sifatnya sukarela.

Perubahan pola produksi dalam kaitannya terhadap praktik kapitalisme inilah yang lantas juga mengubah arah sejarah ekonomi Palembang. Oleh karena secara logis pasar Pemerintah Kolonial Hindia Belanda lebih luas jika dibandingkan dengan pasar Kesultanan Palembang, lahan produksi di wilayah bekas Kesultanan Palembang sifatnya lebih fleksibel. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang memasuki wilayah Palembang pada abad ke-19 atau bertepatan dengan masa industrial di Eropa, mulai menggeser komoditas lada yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi langsung dengan komoditas-komoditas yang berguna bagi kegiatan industri (karet, sawit, dan kina).

## **SIMPULAN**

Sumatra Selatan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya telah mengalami dua praktik kapitalisme secara hampir bersamaan. Sultan Palembang beserta institusi kesultannya telah menjadi agen kapitalis awal (dalam hal ini feodalisme) yang menggerakkan produksi lada secara besar-besaran di beberapa tempat di Sumatra Selatan. Sultan menggunakan legitimasinya sebagai seorang penguasa tertinggi kerajaan dalam mengeksploitasi beberapa wilayah produksinya melalui serangkaian penetrasi politik di beberapa wilayahnya. *Piagem* dapat dikatakan merupakan media penetrasi politik sultan (sebagai seorang *patron*) dalam mendorong para *kawula*-nya (sebagai *klien*) untuk menyediakan barang komoditas lada yang digemari para pedagang mancanegara. Digemarinya lada oleh para pedagang mancanegara telah mengubah konsepsi lada sebagai komoditas menjadi suatu upeti yang diberikan para bawahan raja sebagai bentuk kesetiaan. Pola yang demikian tentu menggambarkan suatu corak *gemeinschaft* dari sistem feodalisme yang berlaku saat itu ketika faktor kebudayaan amat berperan dalam mempertahankan keberlanjutan produksi lada pada masa Kesultanan Palembang. Sistem ini lebih jauh lagi dapat diinterpretasikan sebagai reaksi dari berkembangnya Palembang sebagai titik sentral perniagaan di Sumatra Selatan pada masanya. Sungai-sungai di Sumatra Selatan yang mengalir ke Palembang telah mempertemukan penawaran-penawaran komoditas lada dari pedalaman Sumatra Selatan dengan permintaan komoditas lada dari luar Sumatra Selatan.

Berbeda dengan konteks negara-negara Eropa yang menggeser praktik feodalismenya dengan industrialisasi, di Sumatra Selatan sistem feodalisme digantikan dengan sistem kolonialisme. Perkembangan tersebut tentu dapat dikaitkan dengan adanya pergantian penguasa di Sumatra Selatan, dari yang sebelumnya penguasa feodal lokal beranjak ke penguasa kolonial asing. Sistem kolonialisme Belanda dalam hal ini tentu memiliki orientasi yang berbeda dengan Kesultanan Palembang, yang justru menempatkan lada murni sebagai komoditas dagang dunia. Kepentingan ekonomis Belanda didorong oleh pasar yang meluas serta permintaan yang makin banyak sehingga mendorong adanya penggalakan produksi lada yang lebih masif.

Perubahan permintaan pasar global menyebabkan terjadinya perubahan komoditas unggulan. Hal ini juga mendorong terciptanya fasilitas-fasilitas pelengkap seperti jaringan jalan, jalur kereta, dan pelabuhan-pelabuhan sungai yang berakibat pada menurunnya produksi komoditas lada. Pada perkembangan selanjutnya, komunitas swasta yang mulai masuk ke wilayah Sumatra Selatan juga turut menjadi faktor

pendorong produksi komoditas baru, mengingat semakin bebasnya laju perekonomian di wilayah Sumatra Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kolonialisme telah membawa kepentingan investasi beberapa sumber daya lain selain lada di Sumatra Selatan sehingga dapat dikatakan bahwa kolonialisme juga yang kemudian meruntuhkan produksi lada di Sumatra Selatan. Pada masa itu Pemerintah Hindia Belanda lebih memfokuskan produksi lada sebagai komoditas ekspor di dua wilayah, yaitu Bangka dan Lampung.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Budi Wiyana dan Dr. Wahyu Rizky Andhifani, S.S., M.M. atas hasil penelitian yang merupakan sumber dari penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Barbara Watson. 2016. *Hidup Bersaudara Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Andhifani, Wahyu Rizky, Retno Purwanti, Titet Fauzi Rachmawan, Ari Gunawan, dan Wulandari Eka Pratiwi. 2020. "Laporan Penelitian Deskstudy *Piagem* Kesultanan Palembang: Sebuah Kajian Epigrafi." Palembang.
- Arman, Dedi. 2018. "Perdagangan Lada di Jambi Abad XVI-XVIII." *Handep* 1 (2): 81–106.
- Blaut, J.M. 1989. "Colonialism and the Rise of Capitalism." *Science & Society* 53 (3): 260–96.
- Bowen, Huw. 2015. "Bowen, Huw. . 'Making Money, Making Empires: The Case of the East India Company', Dalam dkk. An Introduction to the History of Capitalism 600-1900 AD." In *An Introduction to the History of Capitalism 600-1900 AD*, edited by B. Koehler. London: Legatum Institute.
- Faille, P de Roo de la. 2020. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Ombak.
- Faisal, A. 1984. "Pengaruh Naungan, Mulsa, dan Pupuk terhadap Pertumbuhan Tanaman Lada (*Piper Nigrum* L) Var. Bulok Belatung." Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Farida. 2009. "Perekonomian Kesultanan Palembang." *Jurnal Sejarah Lontar* 6 (1): 12–20.
- Hakim, Luchman. 2015. *Rempah dan Herba Kebun-Pekarangan Rumah Masyarakat: Keragaman, Sumber Fitofarmaka dan Wisata Kesehatan-Kebugaran*. Yogyakarta: Diandra Creative.
- Hanafiah, Djohan. 1989. *Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Heller, Henry. 2011. *The Birth of Capitalism: A Twenty-First Century Perspective*. London: Pluto Press and Frenword Publishing.
- Kemala, S. 2011. "Strategi Pengembangan Sistem Agribisnis Lada untuk Meningkatkan Pendapatan Petani." *Pengembangan Inovasi Pertanian* 5 (3): 137–55.
- Kusumarini, Niken, dan Nunik Sri Ariyanti. 2015. "Keanekaragaman Kemukus di Jawa." *Floribunda* 5 (3): 92–105.

- Marsden, William. 2016. *The History of Sumatra*. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.
- Marx, Karl. 1867. *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie*. Hamburg: Verlag von Otto Meisner.
- Masyhuri. 1983. "Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790--1825." Tesis. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Bidang Studi Sejarah Indonesia, Universitas Indonesia.
- Mulya, Lillyana. 2014. "Kebijakan Maritim di Hindia Belanda: Langkah Komersil Pemerintah Kolonial." *Mozaik. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 7 (1).
- Neale, R.S. 1975. "Introduction Feudalism, Capitalism and Beyond." In *Feudalism, Capitalism and Beyond*, Edited by E. Kemenka and R.S. Neale., 28–49. Canberra: Australian National University Press.
- Novita, Aryandini. 2013. "Laporan Penelitian Arkeologi. Jaringan Kereta Api di Sumatra Selatan." Palembang.
- Novita, Aryandini, Junus Satrio Atmodjo, Dadang H Purnama, Yanto H M Manurung, Ari Mukti Wardoyo Adi, dan Jepriadi A Lumbu. 2018. "Penelitian Arkeologi Maritim: Peran Pulau Belitung Bagian Selatan dalam Jalur Perdagangan pada Awal Abad XX." Palembang.
- Oegema, J J G. 1982. *De Stroomtractie Op Java En Sumatra*. Antwerpen: Kluwer Technische Boeken B.V. Deventer.
- Pascali, Luigi. 2017. "The Wind of Change: Maritime Technology, Trade and Economic Development." *American Economic Review* 107 (9): 2821–2854. <https://doi.org/10.1257/aer.20140832>.
- R.Z. Leirissa, G.A Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Reid, Anthony. 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450--1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santun, Dedi Irwanto Muhammad. 2011. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara: Sosial Humaniora* 9 (2): 57–65.
- Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suhadi, Machi. 1990. "Piagam Sukabumi dan Palembang dari Sumatra Selatan." In *Monumen Karya Persembahan Untuk Prof. Dr. R Soekmono*, 253–84. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sulistiyono, Singgih Tri. 2014. "Rempah-Rempah dan Perubahan Peta Kekuatan Maritim di Nusantara Abad XVI-XVII." Dalam *Arus Balik Memori Rempah dan Bahari Nusantara, Kolonial dan Poskolonial*, 152–82. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Supriyanto. 1983. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824--1864*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tjandrasasmita, Uka. 1976. "Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan dan Peninggalan Islam". Dalam *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi dan Peninggalan Nasional.

- Turner, Jack. 2011. *Sejarah Rempah: dari Erotisme sampai Imperialisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wellan, J W J. 1923. *Zuid-Sumatra Economisch Overzicht van De Gewesten Djambi, Palembang, De Lampoengsche Districten En Benkoelen*. Wageningen (Holland): H Veenman and Zonen.
- Wiyana, Budi, M. Fadhlan S. Intan, Agus Sudaryadi, Sigit Eko Prasetyo, dan M. Yamun. 2018. "Mengungkap Keberadaan Pelabuhan Kuna di DAS Lumpur Bagian Hilir." Palembang.
- Yudiyanto. 2013. *Tanaman Lada dalam Perspektif Autekologi*. Bandarlampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Yuhono, J T. 2005. "Penentuan Harga Pokok Pembibitan Lada." *Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri* 10 (1): 29–31.
- Zed, Mestika. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubir, Zusneli. 2015. "Sejarah Perkebunan dan Dampaknya bagi Perkembangan Masyarakat di *Onderafdeeling Banjoeasin En Koeboestrekken*, Keresidenan Palembang 1900-1942." *Suluh* 16 (20): 3–17.



